

# RENCANA KERJA TAHUN 2025



- **PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Keberhasilan pelaksanaan suatu program pemerintah tidak terlepas dari peran serta lembaga-lembaga yang terdapat dalam pemerintahan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu sebagai salah satu bagian dari Dinas Instansi yang terdapat di Kabupaten Dompu juga dituntut berperan aktifnya dalam pembangunan daerah terutama terkait dengan peningkatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, baik menyangkut peningkatan produksi maupun pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan.

Pada tahun anggaran 2025, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama pelaku usaha dibidang kelautan dan perikanan, dengan mengacu pada RENSTRA dan RPJMD adalah meningkatkan produksi perikanan baik dari perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan hasil kelautan dan perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan melalui bidang Perikanan Tangkap mengupayakan penambahan sarana armada tangkap, alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan serta kelesatrian ekosistem laut. Bidang budidaya peningkatan luasan rehabilitasi tambak dan bantuan sarana budidaya, pelatihan untuk meningkatkan SDM pembudidaya. Sedangkan untuk bidang pengolahan hasil kelautan dan perikanan akan memaksimalkan bantuan sarana dan prasarana pengolahan, minat pengolah, peningkatan SDM olahan dan ijin usaha pengolah.

Dalam melaksanakan peran tersebut tentunya harus didukung dengan perencanaan yang baik serta sistimatis. Terkait dengan hal tersebut di atas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu telah menyusun program kerja yang berisi tentang kebijakan, program, kegiatan serta langkah-langkah dalam mengimplementasikan segala tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Perencanaan tersebut dituangkan dalam bentuk **“RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DOMPU TAHUN 2025”**

Demikian, semoga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparat lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu.

Dompu, Januari 2025  
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Kabupaten Dompu



**Amiruddin, S.Mut**  
Nip. 197111301998031009

# DAFTAR ISI

|  | Halaman |
|--|---------|
| Sampul .....   | i       |
| Kata Pengantar .....   | ii      |
| Daftar Isi .....   | iii     |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....                                    | 1       |
| 1.1 Latar Belakang .....   | 1       |
| 1.2 Landasan Hukum .....   | 4       |
| 1.3 Maksud Dan Tujuan .....  | 5       |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....                                    | 5       |
| <b>BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA</b> .....                    | 7       |
| <b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>                                |         |
| <b>TAHUN 2024</b>  |         |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaana Renja 2024 .....                         | 7       |
| 2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan<br>Fungsi SKPD ..... | 10      |
| 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....                      | 12      |
| <b>BAB III. TUJUAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b> .....                 | 14      |
| 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan<br>Provinsi .....     | 14      |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....                            | 15      |
| 3.3 Program dan Kegiatan tahun 2025 .....                          | 19      |
| <b>BAB IV. PENUTUP</b> .....                                       | 26      |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LatarBelakang**

Penyusunan Rencana Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2025 dalam rangka memenuhi amanat undang-undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana setiap SKPD diwajibkan untuk menyusun Rencana Kinerja SKPD (Renja SKPD) disetiap tahunnya. Proses penyusunan dokumen Rencana Kinerja SKPD (Renja SKPD) tersebut memerlukan adanya koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui suatu forum yang dinamakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu merupakan dokumen yang memuat rencana kerja untuk satu tahun mendatang. Penyusunan Renja ini berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu pada RKP, yang selanjutnya akan memuat terkait kebijakan, program serta kegiatan pembangunan, yang diharapkan nantinya akan menjadi instrumen yang dapat digunakan oleh SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam melaksanakan pelayanan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu dilaksanakan dengan memperhatikan Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu, yaitu :

#### **Visi**

**“Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan religius dalam rangka memperkuat persatuan bangsa”**

#### **Misi**

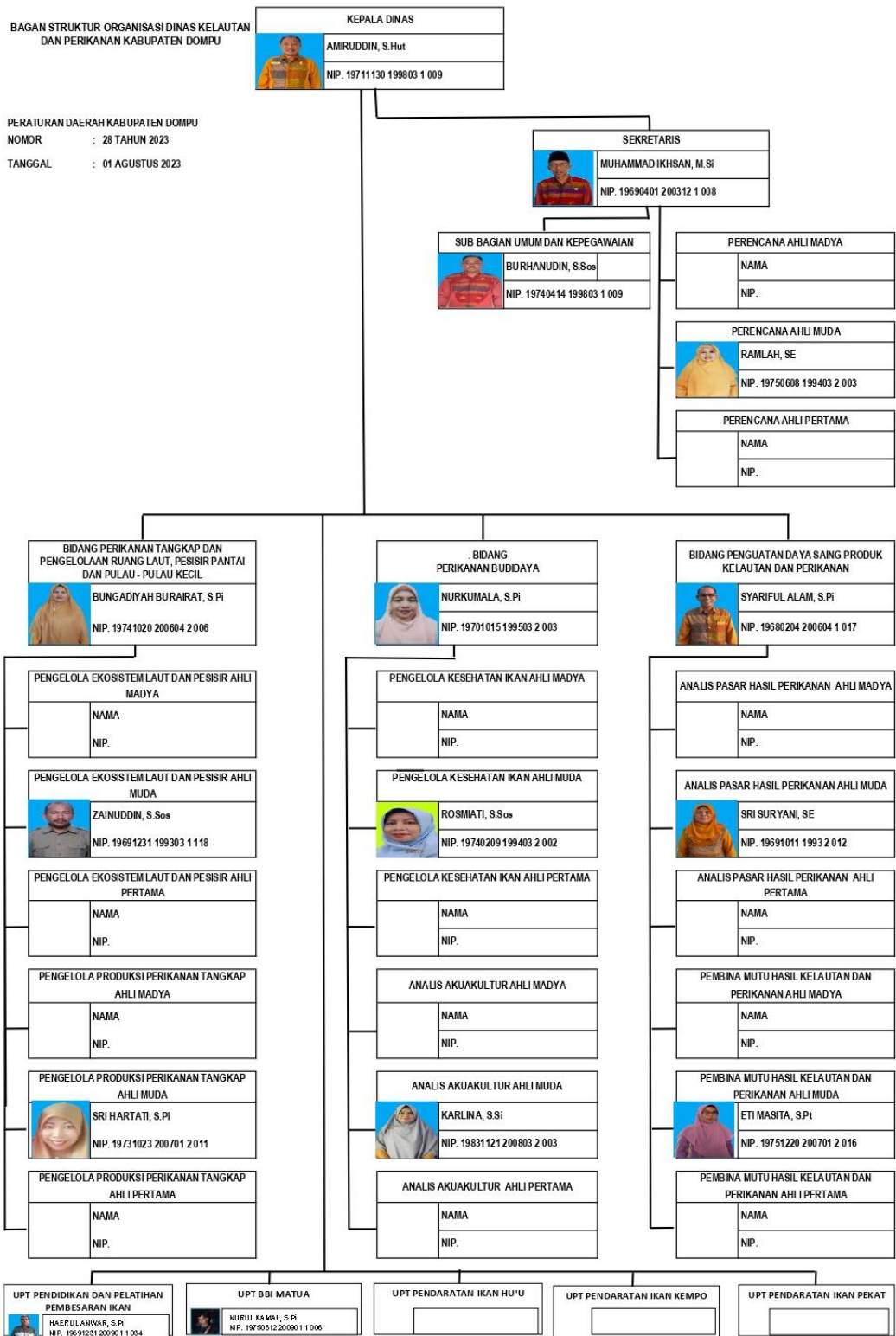
Adapun misi yang dapat di lakukan untuk menunjang visi di atas adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan
2. Mendorong meningkatnya produksi Kelautan dan Perikanan (perikanan tangkap, budidaya dan produk olahan kelautan dan perikanan)

3. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan (pembudidai/nelayan/pengolah dan pemasar)
4. Meningkatnya dan mengembangkan pembangunan infrastruktur, sarana prasarana kelautan dan perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan, sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap pembangunan sektor kelautan dan perikanan memiliki tugas dan tanggung jawab yang rincian tugas pokok dan fungsinya sebagaimana telah di jabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 28 Tahun 2023 dengan struktur organisasi sebagai berikut:





Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan

## 1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2021 disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di wilayah daerah Tingkat I Bali, NTB, dan NTT (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 NOMOR 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah

- Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
  - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  - 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  - 13) Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 12 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Dompu tahun 2005-2025;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai acuan bagi pejabat dan pegawai lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu dalam melaksanakan implementasi tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian target-target yang telah ditetapkan selama Tahun 2025.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

#### **Bab I. Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renja SKPD, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2025.

#### **Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024**



Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu tahun lalu, analisis kinerja pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh SKPD dan pemecahan masalah.

### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN.**

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional serta tujuan dan sasaran Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2025.

### **BAB IV. PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2022**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 dan Capaian Renstra**

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada bab ini merupakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2024 yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024 mencapai nilai **102,75%**, yakni diukur berdasarkan pada perbandingan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan, yang berarti adanya efisiensi penggunaan anggaran.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2024 adalah sbb :

1. Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten
  - ❖ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - ❖ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - ❖ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - ❖ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
  - ❖ Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten
  - ❖ Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah kabupaten
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
  - ❖ Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil
  - ❖ Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan
4. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
  - ❖ Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Hasil Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
  - ❖ Penyediaan dan penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten.

Sementara terkait dengan realisasi anggaran dari masing-masing program tsb diatas tercantum dalam tabel berikut :

**Tabel 1.**  
**Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan**  
**Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu**  
**Tahun 2024**

| No           | Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Anggaran             | Realisasi Anggaran (Rp) | Sisa Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (%) |
|--------------|--|----------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>I.</b>    | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH</b>   | 8.098.292.878        | 7.950.790.844           | 147.502.034        | 98,18                  |
| <b>1.</b>    | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                           | <b>4.831.837.539</b> | <b>4.688.166.975</b>    | 143.670.564        | <b>97,03</b>           |
| <b>1.1</b>   | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                      | 89.754.600           | 89.719.099              | 35.501             | 99,96                  |
| <b>1.1.1</b> | <b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b> | 89.754.600           | 89.719.099              | 35.501             | 99,96                  |
| <b>1.2</b>   | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | 3.461.146.061        | 3.333.427.486           | 127.718.575        | 96,31                  |
| <b>1.2.1</b> | <b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>   | 3.380.045.061        | 3.252.326.486           | 127.718.575        | 96,22                  |
| <b>1.2.2</b> | <b>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</b>                      | 81.101.000           | 81.101.000              | 0                  | 100,00                 |
| <b>1.3</b>   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | 536.579.050          | 536.357.289             | 221.761            | 99,96                  |
| <b>1.3.1</b> | <b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>                      | 18.975.000           | 18.975.000              | 0                  | 100,00                 |
| <b>1.3.2</b> | <b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>  | 58.128.000           | 58.042.000              | 86.000             | 99,85                  |
| <b>1.3.3</b> | <b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>  | 112.620.000          | 112.618.000             | 2.000              | 99,998                 |
| <b>1.3.4</b> | <b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>   | 16.281.050           | 16.280.550              | 500                | 99,997                 |
| <b>1.3.5</b> | <b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>                              | 39.500.000           | 39.400.000              | 100.000            | 99,75                  |
| <b>1.3.6</b> | <b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>                                  | 291.075.000          | 291.041.739             | 33.261             | 99,99                  |
| <b>1.4</b>   | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                      | 197.225.000          | 192.225.000             | 5.000.000          | 97,46                  |
| <b>1.4.1</b> | <b>Pengadaan Mebel</b>   | 74.925.000           | 74.925.000              | 0                  | 100                    |

|       |  |                      |                      |                  |              |
|-------|--|----------------------|----------------------|------------------|--------------|
| 1.4.2 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 122.300.000          | 117.300.000          | 5.000.000        | 95,91        |
| 1.5   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 309.642.828          | 298.988.911          | 10.653.917       | 96,56        |
| 1.5.1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 44.400.000           | 43.469.150           | 930.850          | 97,90        |
| 1.5.2 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 265.242.828          | 255.519.761          | 9.723.067        | 96,33        |
| 1.6   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 237.490.000          | 237.449.190          | 40.810           | 99,98        |
| 1.6.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                      | 107.490.000          | 107.450.190          | 39.810           | 99,962964    |
| 1.6.2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 7.000.000            | 7.000.000            | 0                | 100          |
| 1.6.3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | 123.000.000          | 122.999.000          | 1.000            | 99,999       |
| 2.    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>   | <b>1.192.153.700</b> | <b>1.188.803.090</b> | <b>3.350.610</b> | <b>99,72</b> |
| 2.1   | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | 1.154.060.000        | 1.150.734.390        | 3.325.610        | 99,71        |
| 2.1.1 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap   | 1.154.060.000        | 1.150.734.390        | 3.325.610        | 99,71        |
| 2.2   | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota   | 38.093.700           | 38.068.700           | 25.000           | 99,93        |
| 2.2.1 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil   | 38.093.700           | 38.068.700           | 25.000           | 99,93        |
| 3     | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>  | <b>1.853.745.639</b> | <b>1.853.266.129</b> | <b>479.510</b>   | <b>99,97</b> |
| 3.1   | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil   | 20.000.000           | 20.000.000           | 0                | 100          |
| 3.1.1 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil   | 20.000.000           | 20.000.000           | 0                | 100          |
| 3.2   | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan   | 1.833.745.639        | 1.833.266.129        | 479.510          | 99,97        |
| 3.2.1 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   | 1.697.927.710        | 1.697.618.200        | 309.510          | 99,98        |
| 3.2.2 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  | 135.817.929          | 135.647.929          | 170.000          | 99,87        |

|              |   |                    |                    |              |               |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------|---------------|
| <b>4</b>     | <b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>   | <b>220.556.000</b> | <b>220.554.650</b> | <b>1.350</b> | <b>100,00</b> |
| <b>4.1</b>   | <b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>                  | 178.000.000        | 178.000.000        | 0            | 100           |
| <b>4.1.1</b> | <b>Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b> | 178.000.000        | 178.000.000        | 0            | 100           |
| <b>4.2</b>   | <b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>                    | 42.556.000         | 42.554.650         | 1.350        | 99,997        |
| <b>4.2.1</b> | <b>Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                 | 7.556.000          | 7.555.650          | 350          | 99,995        |
| <b>4.2.2</b> | <b>Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>             | 35.000.000         | 34.999.000         | 1.000        | 99,997        |

Sumber : Data Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

## 2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Sebagai Satuan Kerja yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang Kelautan dan Perikanan memiliki tantangan dan permasalahan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Masih terbatas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan profesionalisme teknis di bidang Kelautan dan Perikanan
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai
3. Belum sempurnanya basis data dan informasi Kelautan dan Perikanan

Sementara terkait faktor penghambat dan pendorong bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut :

### ❖ Faktor Penghambat

1. Terbatasnya kualitas sumber daya aparatur dan penempatan pegawai yang belum optimal;

2. Terbatasnya sarana dan prasarana;
3. Masih terbatasnya data dan informasi tentang Kelautan dan Perikanan serta belum tertata dengan baik dalam suatu sistem jaringan.

❖ **Faktor Pendorong**

1. Adanya political will dari Kepala Daerah untuk mengembangkan sector Kelautan dan Perikanan dengan Jarapasaknya
2. Tersedianya petugas statistik perikanan;
3. Jumlah petugas statistik perikanan dan penyuluh perikanan sebagai pengolah satu data kelautan dan perikanan

Berkaca dari permasalahan, faktor penghambat dan faktor pendorong yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu tersebut di atas, maka kemudian dirumuskan beberapa kebijakan prioritas yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun mendatang :

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Dinas Kelautan dan Perikanan
2. Pendataan potensi kelautan dan perikanan
3. Peningkatan sarana, prasarana dan ketersediaan perangkat teknologi yang dapat mendukung proses pengelolaan data dan informasi kelautan dan perikanan
4. Mengoptimalkan tenaga statistik kelautan dan perikanan untuk memperoleh data Kelautan dan perikanan yang valid.

**Selain dari kebijakan prioritas di atas, maka dirumuskan pula beberapa kebijakan-kebijakan lain yang terdiri dari :**

- 1) Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana penangkapan ikan,
- 2) Penambahan armada penangkapan,
- 3) Peremajaan alat tangkap
- 4) Penumbuhan Kelompok, KUB menjadi koperasi, Penciptaan model-model kemitraan usaha dan fasilitasnya. Pengelolaan dan diversifikasi usaha nelayan, Penataan sentra/kampung nelayan, peningkatan kapasitas nakhoda dan juru mesin.
- 5) Standarisasi kapal dan alat tangkap serta kerekayasaan dan penerapan inovasi teknologi kapal dan alat penangkap ikan yang efisien dan ramah lingkungan.
- 6) Bantuan kapal dan alat tangkap serta penguatan armada perikanan tangkap,
- 7) Mempertahankan keberadaan mangrove dengan cara pengelolaan berkelanjutan, pemulihan dan rehabilitasi mangrove



- 8) Pembangunan apertemen ikan
- 9) Pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan dasar armada tangkap, mesin dan alat tangkap untuk nelayan perikanan tangkap
- 10) Memberikan bantuan sarana dan prasarana budidaya
- 11) Pendampingan penyuluh yang intensif dan pembinaan yang berkesinambungan
- 12) Mengusulkan penambahan exavator
- 13) Memberikan bantuan sarana dan prasarana budidaya
- 14) Pengembangan percontohan budidaya air tawar dan air payau
- 15) Pembuatan jalan produksi
- 16) Melaksanakan bimbingan teknis ataupun pelatihan dasar budidaya untuk tani pembudidaya ikan
- 17) Mengadakan BIMTEK Pengolah dan Pemasar
- 18) Memfasilitasi bantuan Saprasi dari APBN dan APBD
- 19) Pendataan kembali dan validasi jumlah RTP Pengolah dan Pemasar
- 20) Demonstrasi dan kampanye GEMARIKAN

### **2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Proses yang dilakukan dalam membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu telah melakukan berbagai pendekatan Yaitu :

- ❖ Pendekatan Bottom Up : perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang diselaraskan melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat Desa/kelurahan, tingkatKecamatan dan tingkat kabupaten. Pendekatan perencanaan ini tercermin dari adanya :
  - a. Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi, misi dan program Kepala daerah terpilih.
  - b. Memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan daerah.
  - c. Mempertimbangkan hasil forum SKPD.
- ❖ Pendekatan Top Down : perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang diselaraskan melalui penyelenggaraan melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan dan rapat koordinasi/rapat kerja, mulai dari tingkat nasional, Provinsi dan Kabupaten.

Pendekatan perencanaan ini tercermin pada RKPD berupa :

- a. Sinergi dengan RKPD dan Renja SKPD Provinsi NTB, RKP dan Renja Kementrian/Lembaga.
- b. Konsisten dengan RPJMD maupun RPJPD Kabupaten Dompu.
- c. Penanganan masalah dengan pendekatan sistem.
- d. Sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan global seperti Milenium Development Goals (MDG's), Sustainable development, pemenuhan hak asasi manusia, dsb.

Proses membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keterkaitan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan yang telah SKPD kami laksanakan selalu berupaya konsisten dan berkomitmen tinggi dalam hal memenuhi kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Dompu seperti yang tertuang dalam pendekatan *bottom up* dan *top down*. Oleh karena itu, dalam menjalankan program atau kegiatan yang berkaitan bidang kelautan dan perikanan baik dari pelaku usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya serta pelaku usaha pemasaran dan pengolahan produk kelautan perikanan. Dari proses kegiatan yang berjalan tersebut, akan menghasilkan *output* dan *outcome* peningkatan produksi Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu untuk terwujudnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masarakat kelautan dan perikanan (Nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar).

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Kebijakan nasional yang menjadi bahan telaahan dalam proses penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu tahun 2025 adalah :

##### **1. RPJMN**

Penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Dompu mengacu pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan dan RPJMD dimana dokumen tersebut memperhatikan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang ada di RPJMN dengan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan standar pelayanan minimal dan indikator kinerja utama yang perlu direncanakan dan dilaksanakan pertahunnya.

##### **2. Rencana Kerja Pemerintah**

Renja yang disusun setiap tahunnya harus selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan yang ada dan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah.

Penyusunan Renja mengacu pada prioritas pembangunan pada RKPD 2024 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024. Visi dan Misi Pembangunan Nasional tahun 2020-2024 disertai dengan 7 (Tujuh) Agenda Pembangunan Nasional (Nawacita) dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas nasional.

Prioritas pembangunan nasional untuk tahun 2025 berdasarkan pada RKP tahun 2025 terdiri dari 7 prioritas, yaitu :

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
- 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;

6) Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta

7) Memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik.

Prioritas pembangunan Kabupaten Dompu ditujukan selain untuk mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional juga harus sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan pemerintah Provinsi NTB untuk tahun 2025 yaitu :

- 1) Percepatan penurunan angka kemiskinan.
- 2) Peningkatan pelayanan dasar.
- 3) Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif.
- 4) Pemantapan infrastruktur strategis untuk mendukung peningkatan investasi, ketahanan pangan dan pariwisata.
- 5) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

Berdasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah Provinsi NTB yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Dompu untuk tahun 2025 antara lain yaitu :

- 1) Peningkatan akuntabilitas, profesionalitas dan pelayanan public daerah
- 2) Peningkatan pertumbuhan ekonomi sector unggulan daerah
- 3) Peningkatan pemberataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat
- 4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- 5) Peningkatan kualitas infrastruktur pelayabab dasar daerah
- 6) Peningkatan kualitas lingkungan hidup
- 7) Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban

### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD**

#### **❖ Tujuan**

Merupakan penjabaran dari pernyataan visi dan mision yang akan dicapai atau yang dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun yang akan menjadi arah perjalanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu berdasarkan kriteria dan kewenangan yang dimiliki yang mengacu pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2021-2026 yaitu :

#### **1. Meningkatkan kuntabilitas Kinerja dan Keuangan**

## 2. Meningkatnya Nilai PDRB sektor Kelautan dan Perikanan

### ❖ Sasaran

Merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan, program dan kegiatan. Sasaran secara efektif adalah sasaran yang bersifat spesifik, dapat diukur, dapat dicapai dan berorientasi pada hasil yaitu

#### 1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah

#### 2. Meningkatnya Hasil Produksi Kelautan dan Perikanan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis.

**Tabel 3.2.1**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025**  
**Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu**

| No | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja Utama          | Formulasi   | Sumber Data                         | Penanggung Jawab             |
|----|--|----------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------|
| 1  | Meningkatnya Produksi Kelautan dan Perikanan                     | Produksi Perikanan Tangkap       | (Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun N)   | Statistik Bidang Perikanan Tangkap  | Bidang Perikanan Tangkap     |
|    |  | Produksi Perikanan Budidaya      | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Produksi Budidaya Aira Payau+Air Tawar+Budidaya Laut) Tahun N | Statistik Bidang Perikanan Budidaya | Bidang Perikanan Budidaya    |
|    |  | Volume Produksi Olahan Perikanan | (Volume Produksi Olahan Perikanan Tahun N)  | Statistik Bidang PDSPKP             | Bidang PDSPKP                |
| 2  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP OPD                  | Laporan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun -N                 | Dinas Kelautan dan Perikanan        | Dinas Kelautan dan Perikanan |

Sumber : Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2026 Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan juga telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025, yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 1(satu) tahun. RKT 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2.2**  
**Rencana Kinerja Tahun 2025**  
**Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu**

| No | Sasaran Strategis  | Indikator Sasaran  | Target |
|----|--|--|--------|
| 1  | Meningkatkan Produksi Kelautan dan Perikanan                     | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)                    | 49.000 |
|    |  | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)                   | 11.860 |
|    |  | Jumlah Jumlah Produksi Olahan Kelautan Dan Perikanan (Ton) | 23.800 |
| 2  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP OPD  | 89,84  |

Sumber : IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

RKT 2025 pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Target produksi perikanan tangkap merupakan dari hasil perikanan tangkap berupa beberapa jenis ikan, udang, kepiting, binatang lunak, serta rumput laut yakni sebesar 49.000 Ton (target RPJMD 2025)
- Target produksi perikanan budidaya merupakan dari hasil perikanan budidaya baik berupa hasil budidaya air tawar (Nila, lele, karper, tawes, gabus dan ikan patin), air payau (bandeng, nila, udang, ikan belanak dan mujair) maupun air laut (rumput laut jenis *E. cottoni* dan *Gracillaria*) yakni sebesar 11.860 Ton (target RPJMD 2025).
- Target produksi produk olahan kelautan dan perikanan merupakan dari hasil olahan serta pemasaran pelaku usaha perikanan yang meliputi olahan konsumsi dan non konsumsi yakni sebesar 23.800 ton (target RPJMD 2025)
- Target Nilai SAKIP OPD 89,76 (Hasil Penilaian Inspektorat)

#### **Deskripsi Perencanaan Program/Kegiatan :**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten
  - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan.
  - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Fasilitas Kunjungan Tamu dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
  - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, sub kegiatan pengadaan Mebel, Pengadaan peralatan dan mesin lainnya.
  - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah Sungai Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap.
  - Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil.
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan, Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya
  - Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil, Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil.
4. Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, Sub Kegiatan Pelaksanaan

Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

- Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil.

### **3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Program/Kegiatan OPD adalah sekumpulan rencana kerja OPD dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensinya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan OPD menurut rancangan awal RKPD serta mempertimbangkan hasil telaahan Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi.

Berikut disajikan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2024 dan perkiraan maju Tahun 2025 dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.3.1.**  
**Rencana Program / Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2025**

| No        | Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Anggaran             |
|-----------|--|----------------------|
| <b>I</b>  | <b>URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH</b>  | <b>6.285.199.899</b> |
|           | <b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>  | <b>6.285.199.899</b> |
| <b>1.</b> | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>5.284.914.949</b> |
| 1.1       | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 67.863.900           |
| 1.2       | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 4.238.564.871        |
| 1.3       | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 454.778.350          |
| 1.4       | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 41.150.000           |
| 1.5       | Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah  | 328.642.828          |
| 1.6       | Pemeliharaan Barang Milik Daerah   | 153.915.000          |
| <b>2.</b> | <b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>   | <b>604.555.000</b>   |
| 2.1       | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | 599.000.000          |
| 2.2       | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota   | 5.555.000            |
| <b>3.</b> | <b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>  | <b>343.430.000</b>   |
| 3.1       | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil   | 10.000.000           |
| 3.2       | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan   | 333.430.000          |
| <b>4.</b> | <b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>  | <b>52.299.950</b>    |
| 4.1       | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil  |                      |
| 4.2       | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota  | 52.299.950           |

*Sumber : Data Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025*

**Tabel 3.3.2.**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DOMPU**

| Tujuan   | Sasaran  | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                     | Data Capaian Awal Perencanaan (2024) |              | Tahun-4 (2025) |                      | Tahun-5 (2026) |                      | Pengampu (Bidang/ Subid) |
|--|--|--|---|--------------------------------------|--------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|--------------------------|
|  |  |  |   | K                                    | Satuan       | K              | Rp                   | K              | Rp                   |                          |
| -1   | -2   | -3   | -4  | -5                                   | -6           | -9             | -10                  | -11            | -12                  | -13                      |
|  |  | Non Bidang Urusan  |   |                                      |              |                | 8.336.676.682        |                | 8.401.751.078        |                          |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                           | Nilai SAKIP OPD   | <b>87,51</b>                         | <b>Point</b> | <b>89,94</b>   | <b>3.612.223.682</b> | <b>92,54</b>   | <b>3.676.751.078</b> |                          |
|  |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             | Predikat SAKIP OPD  | A                                    | Point        | A-             | 80.000.000           | A-             | 80.000.000           | Sekretariat              |
|  |  | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> | <i>Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Ikhtisar SKPD</i>                    | 1                                    | Dokumen      | 1              | 80.000.000           | 1              | 80.000.000           |                          |
|  |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Presentase pengadministrasian keuangan OPD  | 100                                  | Persen       | 100            | 3.127.223.682        | 100            | 3.141.751.078        | Sekretariat              |
|  |  | <i>Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN</i>   | <i>Terlaksananya Pembayaran Gaji ASN</i>  | 12                                   | Bulan        | 12             | 2.732.223.682        | 12             | 2.741.751.078        |                          |
|  |  | <i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>                      | <i>Pterlaksananya Penatausahaan Keuangan dan Verifikasi Pengujian OPD</i>                       | 12                                   | Bulan        | 12             | 295.000.000          | 12             | 300.000.000          |                          |
|  |  | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keunagan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD</i>             | <i>Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwuulan/Semester SKPD</i> | 13                                   | Dokumen      | 13             | 100.000.000          | 13             | 100.000.000          |                          |

|   |  |        |          |     |             |     |             |             |
|---|--|--------|----------|-----|-------------|-----|-------------|-------------|
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Presentase pengadministrasian umum OPD                     | 100,00 | Persen   | 100 | 255.000.000 | 100 | 265.000.000 | Sekretariat |
| <i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i> | Tersedianya Komponen Listrik                               | 20     | Jenis    | 20  | 25.000.000  | 20  | 30.000.000  |             |
| <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>                     | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor              | 10     | Unit     | 10  | 40.000.000  | 10  | 40.000.000  |             |
| <i>Penyediaan Bahan Logistik</i>  | Tersediannya Bahan Logistik Kantor (OPD)                   | 10     | Bulan    |     | 25.000.000  |     | 30.000.000  |             |
| <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>                          | Terlaksananya penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan      | 30     | Jenis    | 30  | 40.000.000  | 30  | 40.000.000  |             |
| <i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</i>         | Tersediannya Bahan Bacaan OPD                              |        | Bulan    |     | 5.000.000   |     | 5.000.000   |             |
| <i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>  | Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu OPD                 | 12     | Bulan    | 12  | 30.000.000  | 12  | 30.000.000  |             |
| <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>             | Terlaksananya Rapat, Koordinasi dan Konsultasi OPD         | 50     | Kegiatan | 56  | 90.000.000  | 70  | 90.000.000  |             |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah        | Persentase Pengadaan BMD dalam Menunjang Urusan Pemerintah | 100    | Persen   | 100 | 60.000.000  | 100 | 70.000.000  |             |
| <i>Pengadaan mebel</i>  | Tersedianya Mebel untuk menunjang OPD                      | 10     | Unit     | 10  | 25.000.000  | 10  | 30.000.000  |             |
| <i>Pengadaan peralatan dan mesin Lainnya</i>                            | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor              | 5      | Unit     | 5   | 35.000.000  | 5   | 40.000.000  |             |

|  |  |  |   |           |        |              |                      |              |                      |   |
|--|--|--|---|-----------|--------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|---|
|  |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan OPD   | 100       | Persen | 100          | 260.000.000          | 100          | 270.000.000          |   |
|  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik   | Tersediannya Kerjasama dengan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air  | 12        | Bulan  | 12           | 36.000.000           | 12           | 38.000.000           |   |
|  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Tersediannya Jasa Pelayanan Umum kantor   | 12        | Bulan  | 12           | 224.000.000          | 12           | 232.000.000          |   |
|  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase BMD dalam kondisi baik   | 100       | Persen | 100          | 150.000.000          | 100          | 190.000.000          | Sekretariat   |
|  |  | Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan Peroarangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan                                      | Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan kendaraan Operasional   | 1         | Tahun  | 1            | 80.000.000           | 1            | 90.000.000           |   |
|  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya  | 1         | Tahun  | 1            | 25.000.000           | 1            | 30.000.000           |   |
|  |  | Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Terlaksananya pemeliharaan gedung bangunan Kantor   | 1         | Tahun  | 1            | 45.000.000           | 1            | 70.000.000           |   |
| Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan | Meningkatnya Produksi Kelautan dan Perikanan | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>   | Persentase Produksi Perikanan Tangkap terhadap target daerah  | Na        | Persen | <b>20,42</b> | <b>1.850.000.000</b> | <b>20,83</b> | <b>1.850.000.000</b> | Bidang Perikanan Tangkap                                      |
|  |  | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah data dan informasi sumberdaya ikan di perairan darat dalam satu daerah Kabupaten yang tersedia | 49.302,77 | Ton    | 49.000       | 1.650.000.000        | 50.000       | 1.650.000.000        | Subid Sapras Penangkapan Ikan dan Pengelolaan Sumberdaya Ikan |



|  |  |  |  |           |            |              |                      |              |                      |   |
|--|--|--|--|-----------|------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|---|
|  |  | <i>Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap</i>                                | <i>Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang tersedia</i>   | 34        | Unit       | 700          | 1.650.000.000        | 750          | 1.650.000.000        |   |
|  |  | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota                             | Cakupan peningkatan pemberdayaan masyarakat pesisir  | 108,33    | Persen     | 21,11        | 200.000.000          | 22,87        | 200.000.000          | Subid Pemberdayaan Masyarakat pesisir, Pengembangan Usaha dan Kelembagaan |
|  |  | <i>Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil</i>  | <i>Jumlah Nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya</i>  | 130       | Orang      | 80,00        | 200.000.000          | 80,00        | 200.000.000          |   |
|  |  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>                                      | Persentase Produksi Perikanan budidaya terhadap target daerah  | Na        | Persen     | <b>18,25</b> | <b>1.700.000.000</b> | <b>19,25</b> | <b>1.700.000.000</b> | Bidang Perikanan Budidaya   |
|  |  | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil   | Cakupan peningkatan pemberdayaan masyarakat pembudidaya ikan   | 105       | Persen     | 47,89        | 200.000.000          | 59,10        | 200.000.000          | Subid Budidaya dan Usaha Perikanan  |
|  |  | <i>Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil</i>                               | <i>Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas</i>                                  | 210       | Orang      | 417          | 200.000.000          | 527          | 200.000.000          |   |
|  |  | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan   | Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya   | 11.751,70 | Ton        | 11.860,00    | 1.300.000.000,00     | 12.505,00    | 1.300.000.000,00     |   |
|  |  | <i>Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1 Daerah Kabupaten</i>              | <i>Jumlah prasarana pembudidaya ikan dalam 1 daerah kabupaten</i>  | 43        | Unit       | 180          | 1.000.000.000        | 195          | 1.000.000.000        |   |
|  |  | <i>Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 Daerah Kabupaten</i> | <i>Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 daerah kabupaten yang teruji melalui pengelolaan lingkungan</i> | 2.161     | (000) Ekor | 6.597        | 300.000.000          | 6.926        | 300.000.000          |   |


|                       |  |   |   |           |               |            |                      |           |                      |  |
|-----------------------|--|---|---|-----------|---------------|------------|----------------------|-----------|----------------------|--|
|                       |  | <b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>   | <b>Persentase peningkatan volume produksi olahan perikanan</b>  | <b>Na</b> | <b>Persen</b> | <b>5,5</b> | <b>1.174.453.000</b> | <b>28</b> | <b>1.175.000.000</b> | <b>Bidang Penguatan Daya Saing Produk KP</b>     |
|                       |  | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil                         | Cakupan usaha mikro dan kecil bidang perikanan yang tersertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan  | 22,73     | Persen        | 81,82      | 200.000.000          | 100       | 200.000.000          | Subid Bina Mutu dan Diverifikasi Produk KP       |
|                       |  | <i>Pelaksanaan bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Satndar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</i> | <i>Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perijinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanann sesuai skala usaha dan resiko</i> | 20        | Kegiatan      | 15,00      | 1.174.453.000        | 15        | 1.175.000.000        |  |
|                       |  | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota                           | Cakupan ketersediaan bahan baku industri pengolahan ikan  | 100       | Persen        | 100        | 974.453.000          | 100       | 975.000.000          | Subid Pengembangan Investasi dan Sistem Logistik |
|                       |  | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 daerah Kabupaten                                    | Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 daerah kabupaten   | 23.600    | Ton           | 1.500      | 338.714.696          |           | 300.000.000          |  |
|                       |  | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 Daerah Kabupaten                                | Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam satu daerah kabupaten yang terfasilitasi  | 8         | Pokhlahsar    | 160        | 635.738.304          |           | 675.000.000          |  |
| <b>TOTAL ANGGARAN</b> |  |   |   |           |               |            | <b>8.336.676.682</b> |           | <b>8.401.751.078</b> |  |

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Demikian Rencana Kerja ini kami susun, dengan harapan agar dapat dijadikan acuan bagi pejabat dan staf lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan implementasi tugas dan fungsi dalam rangka mengelola potensi kelautan dan perikanan yang terdapat di kabupaten Dompu sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Rencana kerja ini juga diharapkan akan menjadi pedoman terhadap pengambilan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan pada masa yang akan datang.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan arahan guna melengkapi penyusunan Rencana kerja Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Dompu. Namun Demikian guna menyempurnakan isi Rencana Kerja ini sangat diharapkan partisipatif aktif berbagai pihak berupa saran dan kritikan yang sifatnya membangun.

Dompu, Januari 2025  
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Kabupaten Dompu, 



**Amiruddin, S.Hut**  
Pembina TK I/ (IV/b)  
NIP. 19711130 199803 1 009